

BAB I

P E N D A H U L U A N

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa Negara berkembang yang menyepakati tujuan-tujuan pembangunan global dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang telah diratifikasi pada tahun 2000 yang dalam tujuan kelima berbunyi seluruh Negara penandatangan sepakat untuk membuka akses kesehatan reproduksi secara universal kepada seluruh individu yang membutuhkan termasuk didalamnya adalah peningkatan *Contraceptive Pervallence Rate (CPR)*, *penurunan unmeet need*, penurunan angka fertilitas remaja dan peningkatan usia kawin pertama perempuan. Dilain sisi telah terjadi pergeseran paradigma yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program KB sejak ditandatanganinya International Conference on Population and DeVelopment (ICPD) di cairo tahun 1994 yaitu pendekatan demografis menjadi mengedepankan hak-hak asasi manusia.

Di Indonesia sendiri Undang undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi menjadi Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Beberapa permasalahan terkait pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang menjadi isu strategis dan perlu penanganan secara serius melalui Program Kependudukan dan Keluarga berencana di Kota Ambon antara lain :

1. Tingginya Pertambahan penduduk non kelahiran (Migrasi/Urbanisasi) di Kota Ambon yang mengakibatkan tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk.
2. Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence rate/CPR) bervariasi dengan penggunaan Methode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah.
3. Masih rendahnya Pelayanan KB dengan Jaminan Kesehatan Nasional

4. Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pengelola perlu ditingkatkan dengan penempatan tenaga pengelola merata di tiap desa/kelurahan minimal 1 orang di setiap desa/kelurahan.
5. Masih rendahnya koordinasi lintas sektor terkait pengelolaan KB
6. Masih rendahnya kualitas penduduk dan pemberdayaan keluarga

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Ambon, maka Tugas Pokok DPPKB Kota Ambon adalah membantu Walikota melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di tingkat Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya DPPKB Kota Ambon mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan Operasional di Bidang Pengendalian Pendudukan dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.
2. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
3. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
4. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
5. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
6. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Badan
7. Pembinaan Unit Pelaksanaan teknis Badan
8. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Selanjutnya fungsi tersebut dijabarkan dalam uraian tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Ambon nomor 17 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Penyusunan LAKIP oleh masing-masing instansi pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Ambon Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon diatur dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 17 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi
 - Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Bidang Pengendalian Penduduk membawahi
 - Seksi Advokasi dan Pergerakan
 - Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga (PLKB) Berencana dan Keluarga Berencana
 - Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Kelurga
- d. Bidang Keluarga Berencana membawahi
 - Seksi Pengendalian dan Pendistribusian alat Kontrasepsi (ALOKON)
 - Seksi Jaminan Pelayanan KB
 - Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi
 - Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia
 - Seksi Bina Ketahanan Remaja
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Susunan Organisasi unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Lapangan Kependudukan dan KB pada DPPKB Kota Ambon sebagai berikut :

- a. Kepala UPT Pengendali Program Lapangan Kependudukan dan KB Kecamatan

Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon sebagai berikut : (Terlampir)

D. MANDAT DPPKB KOTA AMBON

Mandat DPPKB Kota Ambon adalah melaksanakan segala kebijakan di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga demi menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

E. PERAN STRATEGI

Peran strategi DPPKB Kota Amabon adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan kepesertaan ber-KB (CPR) dan menekan angka kelahiran total (TFR) demi menciptakan keluarga kecil bahagia sejahtera

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Guna memperlancar pelaksanaan tugas Pemerintahan , Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Ambon didukung oleh potensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 57 orang (Data sampai Desember 2015) PNS definitif Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel.1.1.1. SDM DPPKB Kota Ambon

Jenis Pendidikan							Jml	Golongan				Jml
SD	SMP	SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
0	0	7	0/0	15	1	0	23	0	1	14	8	23

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon adalah suatu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan yaitu Tahun 2017 – 2022, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon Tahun 2017 – 2022 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

VISI DAN MISI WALIKOTA AMBON

I. VISI

Untuk menyelenggarakan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Ambon dalam kurun waktu 2017-2022, maka visi DPPKB Kota Ambon adalah :

” AMBON HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS.”

II. MISI

Dalam mewujudkan visi Walikota Ambon yaitu ” **AMBON HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS.**”, maka misi Walikota Ambon adalah :

1. Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumber daya alam yang tersedia
4. Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat

III. TATA NILAI

Untuk mencapai Visi dan Misi diperlukan adanya tata nilai yang terdapat pada masyarakat Kota Ambon yang meliputi :

1. Kalesang Ambon (Peduli)
2. Potong di Kuku Rasa di Daging
3. Sagu Salempeng di Pata Dua
4. Bersatu Manggurebe Maju
5. Masohi (Gotong Royong)

IV. TUJUAN

Untuk melaksanakan misi dan mencapai visi DPPKB maka tujuan yang harus dicapai oleh DPPKB yaitu :

1. Terwujudnya Penduduk tumbuh seimbang
2. Meningkatkan Pembinaan Peserta KB
3. Meningkatkan Pemahaman Remaja Mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

V. SASARAN

Sasaran merupakan misi yang menggambarkan tujuan yang akan diwujudkan dan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, sehingga sasarannya adalah : “ memantapkan koordinasi internal maupun eksternal sebagai bagian terpenting untuk mewujudkan visi dan misi dalam pencapaian target yang diinginkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Ambon yang meliputi :

1. Terwujudnya Penduduk Tunbuh seimbang yang ditandai dengan Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
2. Meningkatnya Peserta KB Aktif bagi Pasangan Usia Subur menjadi
3. Meningkatnya Peserta KB Pria

4. Menurunnya Kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmeet need)
5. Menurunnya Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15 – 19 tahun (ASFR 15-19 Tahun)
6. Meningkatnya Usia Kawin pertama perempuan dari 19 tahun menjadi 21 tahun

VI. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran . Berikut Strategi dan Kebijakan yang sudah dirumuskan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon yakni :

Strategi :

- Mewujudkan Penguatan koordinasi dengan Lintas sektor terkait
- Melakukan advokasi lintas sektor terkait
- Melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Program Keluarga Berencana.
- Mewujudkan tersedianya Data Base dan Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana yang aktual.

Kebijakan :

- Meningkatkan Kapasitas sumberdaya aparatur Pengelola KB dan Kelembagaan KB di Masyarakat yang berkualitas sebagai dinamisor dan motivator dalam pelaksanaan program Kependudukan dan KB di daerah.
- Memperkuat mekanisme Pengendalian pelaksanaan program dengan mengedepankan pendekatan koordinasi.
- Memperkuat kapasitas kelembagaan institusi di masyarakat untuk menunjang terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara partisipatif di bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana
- Mengelola dan memanfaatkan database untuk mengoptimalkan Pengendalian program yang berkelanjutan.

- Peningkatan kapasitas sistem pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta memperluas jangkauan promosi dan advokasi kesehatan reproduksi.

B. RENCANA KINERJA

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon, maka sasaran dari Pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai tujuan yang akan dicapai tahun 2017 adalah

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dengan menurunnya Total Fertility Rate (TFR)
2. Menurunnya Kebutuhan Ber-KB tidak terlayani (Unmeet Need)
3. Meningkatnya Peserta KB Pria
4. Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) 74 %
5. Menurunnya Angka Kelahiran pada Remaja usia 15-19 Tahun
6. Meningkatnya Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah 20 Tahun

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon (DPPKB) menjabarkan tujuan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai selama periode RENSTRA Reviuw. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator
Tahun 2017-2022**

Tujuan 1:	
Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang	
Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1. Prosentase Laju Pertumbuhan Penduduk 2. Angka Kelahiran Total (TFR)

Tujuan 2 :	
Meningkatkan Pembinaan Peserta KB dengan Memperkuat Pelayanan KB yang merata dan berkualitas	
Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya Peserta KB Aktif Bagi Pasangan Usia Subur	1. Prosentase Peserta KB Aktif (CPR)

2. Menurunnya Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	2. Prosentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
3. Menurunnya Droup Out Peserta KB	3. Prosentase Drop Out Peserta KB

Tujuan 3 :	
Meningkatkan Pemahaman Remaja Mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
Sasaran Strategis 3	Indikator Kinerja
1. Menurunnya Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun	1. Prosentase Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun 2. Prosentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Untuk mencapai misinya Walikota Ambon menetapkan 3 Tujuan Strategis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis I Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Melalui sasaran strategis ini DPPKB berkomitmen mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan menetapkan sasaran strategis yaitu :

Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)

Penduduk merupakan modal pembangunan. Dalam pembangunan penduduk dapat menjadi aset jika disertai dengan sumber daya yang baik. Disisi lain jumlah penduduk yang terlampau sedikit dapat menjadi masalah bagi keberlangsungan jumlah penduduk dimasa depan. Oleh karena itu Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) menjadi sasaran strategis yang harus diperhatikan dari waktu ke waktu. Angka kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Melalui sasaran strategis ini DPPKB Kota Ambon

memastikan membuat kegiatan-kegiatan strategis yang fokus pada pengendalian jumlah penduduk.

2. Tujuan Strategis II

1. Meningkatkan Pembinaan Peserta KB dengan Memperkuat Pelayanan KB yang merata dan berkualitas

Menggunakan kontrasepsi merupakan salah satu upaya dalam Program KKBPK untuk pengendalian fertilitas atau menekan pertumbuhan penduduk yang paling efektif. Didalam pelaksanaannya diupayakan agar semua metode kontrasepsi yang disediakan dan ditawarkan kepada masyarakat memberikan manfaat optimal dengan meminimalkan efek samping maupun keluhan yang ditimbulkan. Metode kontrasepsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu metode Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (Non MKJP).

Untuk mencapai tujuan ini DPPKB telah menetapkan Dua sasaran Strategis yaitu :

Menikatkan Peserta KB Aktif bagi Pasangan Usia Subur

Sejak pemerintah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) pada awal tahun 1970-an, angka kelahiran mengalami penurunan yang sangat berarti. Keberhasilan ini salah satunya didukung oleh keberhasilan peningkatan pemakaian alat dan obat kontrasepsi. Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu faktor antara (proximate determinant) fertilitas yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi demografi, sosial, ekonomi, hukum, politik dan lingkungan. Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Melalui sasaran strategis ini DPPKB Kota Ambon berupaya meningkatkan pemakaian kontrasepsi guna mengendalikan angka kelahiran.

Menurunnya Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

Unmet need merupakan kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi. Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi didefinisikan sebagai prosentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Bagi DPPKB estimasi ukuran dan komposisi dari populasi wanita yang kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi berguna untuk menilai sejauh mana Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui sasaran strategis ini DPPKB telah bertekad menurunkan angka unmet need.

Menurunnya Droup Out Peserta KB

Droup Out merupakan Pasangan Usia Subur yang sama sekali tidak menggunakan KB dan Pasangan Usia Subur akan tetapi memutuskan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Bagi DPPKB melakukan estimasi ukuran dengan menurunkan angka Droup Out peserta KB dengan pelayanan mobile

3. Tujuan Strategis III

1. Meningkatkan Pemahaman Remaja Mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tidak hanya bertanggung jawab atas pengendalian penduduk di Indonesia namun juga berupaya meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan yang merupakan prasyarat utama dalam memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Pada pasal 47 ayat (1) undang undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya pada pasal 48 disebutkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan

dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan salah satunya melalui peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.

Melalui tujuan strategis meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi DPPKB ingin agar remaja di Indonesia memiliki pengetahuan tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi agar terhindar dari kehamilan dan melahirkan di usia remaja

Untuk mencapai tujuan ini DPPKB Kota Ambon menetapkan sasaran strategis yaitu :

Menurunnya Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19 Tahun)

Fertilitas remaja merupakan isu penting dari segi kesehatan dan sosial karena berhubungan dengan tingkat kesakitan serta kematian ibu dan anak. Ibu dan anak yang berumur remaja, terutama dibawah 18 tahun lebih berpeluang untuk mengalami masalah pada bayinya atau bahkan mengalami kematian yang berkaitan dengan persalinan dibandingkan dengan wanita yang lebih tua. Selain itu melahirkan pada umur muda mengurangi kesempatan untuk mengikuti pendidikan atau mendapat pekerjaan. Melalui sasaran strategis ini DPPKB Kota Ambon berupaya melalui berbagai kegiatan seperti Generasi Berencana (Genre) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) agar angka kelahiran pada Remaja usia 15 -19 Tahun dapat terus menurun

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggung - jawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai Visi, Misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, DPPKB Kota Ambon didukung Oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan dan Klinik KB baik pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 ini merupakan pelaporan kinerja bertolok ukur RPJMD.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategi DPPKB Kota Ambon Tahun 2017 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2017

No	Indikator	Capaian Kinerja			
		2016	Target	Realisasi	%
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,21	2,21	2,20	100,45
2	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	75,14	75,14	80,09	106,59
3	Prosentase Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Baru	21,02	21,02	13,88	66,03
4	Prosentase Peserta KB Baru Pria	0,84	0,84	2,02	240,48
5	Prosentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)	14,48	14,48	13,18	91,02
6	Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah Usia 20 Tahun	2,15	2,15	0,72	33,49
7	Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15 – 19 Tahun (ASFR)	22,6	22,6	22,6	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pembangunan urusan kependudukan dan keluarga berencana selama tahun 2017 telah mencapai hasil yang baik terutama ditandai dengan penurunan TFR dari 2,21 % pada tahun 2016 menjadi 2,20 % pada tahun 2017 dan peningkatan (Contraceptive Prevalence rate/CPR) dari 75,14% dari PUS 46.708 di tahun 2016 menjadi 80,09% dari PUS 44.564 di tahun 2017. Sementara itu dalam upaya pendewasaan usia perkawinan tingkat pencaianan PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 33,49% dari sebelumnya yaitu 2,15% pada tahun 2016 menjadi 0,72 % di tahun 2017.

Selain itu, kami berhasil menurunkan cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) yaitu dari 14,48% di tahun 2016 menjadi 13,18% di tahun 2017. Di lain sisi, tingkat partisipasi Pria dalam ber-KB jika dilihat dari data prosentase KB baru Pria mengalami kenaikan yaitu 0,84% dari tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 2,02 %. Data tersebut menunjukkan bahwa prosentase peserta KB pria sangat tinggi jika dibandingkan dengan peserta KB aktif wanita. Angka Prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2017 adalah 80,09% yaitu terjadi peningkatan sebesar 106,59 % jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 75,14% dengan komposisi penggunaan alat

kontrasepsi jangka pendek terutama suntik masih mendominasi. Data terkait dengan metode kontrasepsi bagi peserta KB tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Peserta KB Menurut Kontrasepsi Tahun 2016-2017

No	Metode Kontrasepsi	Capaian Kinerja			
		2016	Target 2017	Capaian	%
1.	IUD	1.230	1.230	4.147	772,25
2.	MOW	2.288	2.288	1.799	175,17
3.	MOP	91	91	110	127,90
4.	Kondom	1.163	1.163	1.931	129,30
5.	Implant	3.714	3.714	5.669	281,20
6.	Suntik	4.805	4.805	14.428	156,07
7.	PIL	5.010	5.010	7.609	278,04



B. Realisasi Anggaran**Tabel. 3.3****Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2017
Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana**

No	Program	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
A.	Belanja Langsung	4.969.260.675	4.741.296.200	95,41
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	331.156.000	328.543.260	99,21
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	297.905.500	274.688.665	92,21
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	67.865.500	67.865.500	100
4.	Keserasian Kebijakan Penduduk	398.686.625	290.580.125	72,88
5.	Keluarga Berencana	786.685.400	702.652.000	89,32
6.	Kesehatan Reproduksi Remaja	32.540.700	32.540.700	100
7.	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	39.050.000	39.050.000	100
8.	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	1.084.125.000	1.084.125.000	100
9.	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	92.912.950	92.912.950	100
10.	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	357.648.000	357.648.000	100
11.	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan KB	1.473.800.000	1.470.690.000	99,78
B	Belanja Tidak Langsung	4.923.665.310	4.324.740.607	87,84
1.	Gaji Pegawai	3.679.731.070	3.239.652.531	88,04
2.	Tunjangan Tambahan penghasilan PNS	1.243.934.240	1.085.088.076	87,23
	Jumlah Total	9.892.925.985	9.066.036.807	91,64

C. Penghargaan/Keberhasilan yang diterima secara Nasional/Provinsi/Kota Tahun 2017 adalah

1. Cipta Award dari YCCP (Yayasan Cipta Cara Padu) untuk dukungan Pemerintah Kota terhadap Revitalisasi Tim KB Desa Tahun 2017 di Pontianak.
2. Juara III Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan dari Pelaksanaan dan Pengawasan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat terlaksanan sebagaimana mestinya apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, terdidik dan terampil sehingga perlu adanya pendidikan formal maupun non formal.

Tercapainya sasaran dan terwujudnya program dan kegiatan yang telah direncanakan harus melalui pelaksanaan yang tepat, baik dari segi waktu maupun segi pembiayaan karena program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/ keluarga.

Akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 disusun untuk dapat menjadi tolok ukur pengembangan perencanaan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di tahun 2017 secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ambon, Januari 2018
Plt. Kepala DPPKB Kota Ambon,

Ir.J.W.PATTY, M,Si
Pembina Tk. I
NIP : 19680114 199312 2 001